

DAFTAR ISI



Kedudukan dan Kewenangan Keraton Yogyakarta Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang

No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

INDRI TEDJA TYASNING, H. Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://erd.repository.ugm.ac.id/>

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Keaslian Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Kesatuan	12
B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	15
C. Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa	24
D. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	37
a. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Secara Luas	37
b. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam	
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang	
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	41
E. Keraton Yogyakarta	43
a. Kedudukan Keraton Yogyakarta	45
b. Hubungan Keraton Yogyakarta dengan	
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa	
Yogyakarta.	47

A. Jenis Penelitian	49
B. Metode Pengumpulan Data	50
C. Jalannya Penelitian	50
D. Penelitian dan Responden	54
E. Analisis Hasil Penelitian	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Keraton Yogyakarta dalam Pemerintahan Daerah DIY	57
B. Hubungan Keraton Yogyakarta dengan Pemerintahan Daerah DIY terkait kewenangannya dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------